

## BAB II

**STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR****A. Studi Kepustakaan**

Untuk memperjelas konsep dalam penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa teori sesuai dengan judul penelitian yaitu Peranan Lurah dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Teori-teori yang di gunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan.

Kehidupan bermasyarakat dengan adanya pemerintah akan menjai sebuah garis-garis besar keteraturan kehidupan dalam bermasyarakat, bersamaan dengan munculnya Negara sebagai organisasi yang relative di kehidupan bermasyarakat maka pemerintah dapat terorganisir dan dapat melayani segala kebutuhan dalam cakupan pelayanan publik.

**1. Teori Pemerintahan**

Secara etimologis pemerintahan dapat di artikan sebagai berikut perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang di perintah memiliki kepatutan akan keharusan. setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Setelah di tambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut (Syafiie, 2007:4)

Pemerintah atau pemerintahan dalam arti sempit adalah pemegang kekuasaan eksekutif, sedangkan arti luas lembaga dan kegiatannya dalam suatu negara. Jadi juga menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan legislatif dan yudikatif (Sudibjo dalam Ismani H, 1996:8). Menurut Sitanggang (1996:23) pemerintah adalah suatu sistem dari gerak semua fungsi yang ada disuatu masyarakat negara yang mempunyai wilayah tertentu yang digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mencapai tujuan meliputi bidang-bidang kejasmanian dan kerohanian. Bahkan menurut Kuper (2000:218) istilah *government* (pemerintah) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik.

Sedangkan menurut Ndraha (2005:36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Musanef (1992:8) mengartikan ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinamis, berhubungan dengan keserasian ke dalam hubungan antara dinamis itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya upaya suatu negara untuk mencapai tujuannya.

Menurut Sedarmayanti (2004:35) pemerintah atau *government* adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara

bagian, atau negara kota dan sebagainya. Sedangkan pemerintahan atau *government* adalah tindakan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya secara etimologis pemerintahan dapat di artikan sebagai berikut dibawah ini :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki kepatuan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi awalan “an” menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. (Syafiie, 2007:4)

Pemerintahan (*Governance*) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat (dalam Awang dan Wijaya, 2012:8).

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menghormati kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas dari pemerintah adalah :

1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. (Sedermayanti 2004 :9 )

Menurut Budiarto (2003:21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara. Rakyat atau penduduk suatu Negara memiliki tujuan untuk membentuk Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Pemerintah adalah lembaga atau suatu lembaga organisasi orang-orang yang perintah-perintahnya ditaati oleh rakyat. Sedangkan pemerintahan adalah Bergeraknya semua fungsi-fungsi kedaulatan atau kekuasaan negara dalam mencapai tujuan bersama, dalam kenyataan sehari-hari dapat menunjukkan keutuhan kegiatan pemerintahan seperti pemerintahan Kabupaten, Kelurahan dan lain-lain dalam pengertian umum. (Sitanggang 1998:118)

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian, dan minuman. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain, dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dari institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

## **2. Teori Kepemimpinan**

Lurah merupakan pemimpin di kelurahannya yang mempunyai tugas serta wewenang untuk memimpin di wilayah kerjanya. Peran dari seseorang pemimpin

sangat diperlukan dalam mengarahkan, menggerakkan dan mengajak masyarakat untuk secara sadar dan bertanggung jawab melaksanakan berbagai kegiatan yang ada di Kelurahan demi pencapaian tujuan bersama. Pemimpin adalah pribadi yang dimiliki keterampilan teknis, khususnya dalam bidang kepemimpinan, sehingga ia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan organisasi.

Kepemimpinan adalah gejala sosial, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri dengan cara-cara tertentu sehingga perilaku orang lain itu berubah atau tetap menjadi integratif. (Ndraha, 2003;216)

Selanjutnya menurut Kartono (1990;29) menjelaskan bahwa teori yang menonjol dalam menjelaskan kemunculan pemimpin adalah :

1. Teori Genetis

- Pemimpin itu tidak dibuat,akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakatnya yang luar biasa sejak lahirnya.
- Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi kondisi yang bagaimana pun juga yang khusus.
- Secara filsafi, teori tersebut menganut pandangan deterministis.

2. Teori Sosial

- Pemimpin itu harus disiapkan, di didik dan dibentuk, tidak terlahir begitu saja.
- Setiap orang bisa menjadi pemimpin, melalui usaha penyiapan dan pendidikan, serta didorong oleh kemauan sendiri.

### 3. Teori Ekologis

- Seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat tersebut dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya.

### 3. Teori Kebijakan

Menurut Dunn perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

- a. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
- b. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
- c. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
- d. Penilaian terhadap kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuatan kebijakan. (Dunn, 2003;105)

Menurut Laswell, Kebijakan adalah sebagai sasaran untuk mencapai tujuan kebijakan itu tertuang dalam program yang di arahkan pada pencapaian tujuan nilai dan peraktek. (dalam Lubis, 2007:19)

Syafiie (2010:150) menyebutkan : “Model kebijakan yang sesuai dengan sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, atau keperluan dan hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan, dan lain-lain yang mempengaruhi *public polic*, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Menurut Anderson menyatakan bahwa “*Public Policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. Sedangkan menurut (Kansil dan Cristine, 2008;190) kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

#### **4. Teori Peranan**

Peranan dalam menyelenggarakan pemerintahan adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah disusun secara tegas akan memudahkan birikrasi pemerinthan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya disfungsi birikrasi sebagai akibat struktur yang tidak rasional, tidak diperlengkapi oleh pegawai yang betul-betul profesional. Menurut Ndraha (2003:53) peranan diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari atau telah di tetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiapjenjang pemerintahan.

Menurut Siagian (2001:148) menyebutkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai stabilisator,
2. Sebagai inovator,
3. Sebagai pelopor.

Menurut pendapat Soekanto (2004:244) Peranan dapat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sementara menurut Ndraha (1987:253) Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau lebih telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan. Menurut Soekanto (2002: 243) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Kusnandi (2005:358) ada 3 peran yang dilakukan pimpinan dalam organisasi yaitu :

1. Peran pribadi (*interpersonal role*) mengacu pada hubungan antar pemimpin dengan yang lain baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini pemimpin memiliki peran yang berbeda yaitu :
  - a. Figuran, bertindak sebagai simbol organisasi.



- b. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif dan efisien dan mempengaruhi mereka bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
  - c. Peran perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai.
2. Peran berkaitan dengan informasi (*informasi role*) dimana pemimpin merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerja sama antar pegawai yang berada dalam lingkungannya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam 3 hal yaitu :
- a. Memantau secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan diluar organisasi yang di anggap relevan.
  - b. Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan keseluruhan bagian organisasi.
  - c. Sebagai juru bicara.
3. Peran keputusan (*decision role*) dalam hal ini pemimpin memainkan empat peran yaitu peran wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding.

### **5. Konsep Kelurahan**

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah kelurahan beserta jajarannya melaksanakan tugas ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan wilayahnya masing-masing. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban dan menciptakan ketentraman, dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Lurah sebagai pemimpin formal yang langsung berhadapan dengan masyarakat, melaksanakan teknis administrasi pemerintahan dan tugas pembangunan di Kelurahan. Maka dari itu tugas seorang lurah dalam memimpin kelurahan sangat diperlukan guna memelihara ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat sehingga dengan demikian diharapkan agar masyarakat di lingkungan kelurahan bisa hidup dengan tenang dan tenteram.

Pada dasarnya lurah berkewajiban untuk berusaha terus menerus menciptakan situasi aman dan tertib bagi seluruh anggota masyarakat baik di banding mental sipitual maupun fisik meterial. (Wijaya 2002;116).

Tugas dan kewajiban lurah dalam bidang pemeliharaan, ketentraman dan ketertiban adalah sebagai berikut :

1. Lurah mempunyai wewenang untuk mengusut dan menyelidiki pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di Kelurahanya, karena ia memiliki kewenangan atas pekerjaan kepolisian di Kelurahanya.
2. Segera menangani dan melaporkan kepada instansi-instansi yang berwenang bila terjadi atau menerima laporan tentang pristiwa kriminalitas di daerahnya.

3. Segera melaporkan kepada pihak yang bewajib apabila di Kelurahannya terjadi kematian yang tidak wajar.
4. Mengatur giliran dan mengawasi jalannya perondaan. (Widjaya, 2002;166)

Berdasarkan pendapat Widjaya (2002:166) di atas, maka penulis menetapkan tugas dan kewajiban lurah dalam bidang pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban sebagai indikator berikut ini:

1. Mengusut dan menyelidiki
2. Menangani dan melaporkan
3. Mengatur dan mengawasi.

#### **6. Teori Ketenteraman dan Ketertiban**

Konsep keamanan pada hakekatnya adalah konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan serasi dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh berdasarkan Undang-Undang 1945. Keamanan asal katanya adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.

Menurut Rauf (2005;8) bahwa faktor utama untuk tercapainya ketenteraman dan ketertiban adalah pemeliharaan keamanan. Keamanan dapat dirasakan apabila adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman, rasa di lindungi, dan rasa bebas dari keluhawatiran dan ketakutan.

Ketertiban merupakan salah satu syarat utama dalam mengsucceskan pembangunan. Ketertiban menurut Madjloes adalah sebagai suatu asas tata kehidupan dan hasil dari ketentuan-ketentuan, baik secara tertulis yang disepakati dan dilaksanakan bersama. (Madjloes dalam Rauf, 2005;6)

Kondisi tentram dan tertib bagi masyarakat tidak akan tercapai apabila tidak adanya keamanan, seperti yang dinyatakan oleh Soejito bahwa istila ketentraman dan ketertiban kadang-kadang disebut keamanan dan ketertiban karena ketentraman dan ketertiban tidak akan mungkin diperoleh tanpa adanya pemeliharaan keamanan. (Soejito dalam Rauf, 2005;69)

Menurut Abdussalam (2007;104) Keamanan adalah perlindungan dari segala kekerasan-kekerasan atau kekejaman-kekejaman terhadap seseorang termasuk tindakan-tindakan yang mencela fisik atau psikologi maupun serangan yang bersifat memfitnah pada moral seseorang.

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur, ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan di antaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat (dalam Ermaya, 2000:6).

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi ketentraman dan ketertiban akan terkait dengan masalah keamanan, sehingga tanpa keamanan tidak akan tercipta ketentraman dan ketertiban, sedangkan ketentraman dan ketertiban merupakan dua keadaan yang dapat dirasakan secara bersama.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan dan referensi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Agus Eko Prasetyo (2014)	Peranan Lurah Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu (Studi Pada Organisasi Bhayangkara)	Tugas lurah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Metode penelitian Lokasi penelitian Indikator yang ditetapkan
2	Ichwann Hastona (2015)	Fungsi Pembinaan Lurah Terhadap Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2013-2014	Tugas dan fungsi Lurah	Metode penelitian Lokasi penelitian Indikator yang ditetapkan
3	Dini Annisa Tifany (2015)	Fungsi Lurah Dalam Membina Penetapan Jabatan RT/RW Di Kelurahan Kota Baru Pekanbaru Kota	Tugas dan fungsi Lurah	Metode penelitian Indikator yang ditetapkan
4	Darman Daraba (2017)	Peranan Lurah Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dan Pembangunan Kelurahan Samata Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa	Tugas dan fungsi Lurah	Metode penelitian Lokasi penelitian Indikator yang ditetapkan

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan dan referensi dalam penelitian ini, maka dapat penulis uraikan perbedaan dan persamaan antara penelitian dengan penelitian terdahulu. Dimana pada peneliti Agus Eko Prasetyo (2014) terdapat persamaan objek yang diteliti mengenai tugas lurah mengenai penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, sementara perbedaan terdapat pada konsep teori dan indikator yang digunakan, metode penelitian yang berbeda, peneliti menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif. Selain itu perbedaan yang paling mendasar terletak pada lokasi penelitian yang berbeda.

Pada penelitian Ichwan Hastona (2015) terdapat persamaan objek yang diteliti mengenai tugas lurah, namun terdapat berbeda mengenai fokus tugas yang diteliti. Sementara perbedaan terdapat pada konsep teori dan indikator yang digunakan, metode penelitian yang berbeda, peneliti menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif.

Penelitian Dini Annisa Tifany (2015) terdapat persamaan objek yang diteliti mengenai tugas lurah, namun terdapat berbeda mengenai fokus tugas yang diteliti. Sementara perbedaan terdapat pada konsep teori dan indikator yang digunakan, metode penelitian yang berbeda, peneliti menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif. Selain itu perbedaan yang paling mendasar terletak pada lokasi penelitian yang berbeda.

Terakhir penelitian Darnam Daraba (2017) terdapat persamaan objek yang diteliti mengenai tugas lurah, namun terdapat berbeda mengenai fokus tugas yang diteliti. Sementara perbedaan terdapat pada konsep teori dan indikator yang

digunakan, metode penelitian yang berbeda, peneliti menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif. Selain itu perbedaan yang paling mendasar terletak pada lokasi penelitian yang berbeda.

### **C. Kerangka Pikiran**

Kerangka pikir ini adalah untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian Peranan Lurah Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Kerangka pemikiran ini bermaksud mencari kesimpulan dengan memeparkan keterkaitan antara Variabel penelitian dengan indikator-indikator penentu, seperti pada gambar berikut ini :

**Gambar II.1 : Kerangka Pikir Peranan Lurah Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.**



Sumber: Olahan Penelitian, 2018.

#### **D. Konsep Operasional**

Definisi Operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional atau (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut, sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

Supaya penulis mudah dalam menganalisa dalam penelitian ini, berikut akan disusun dalam bentuk konsep operasional yang sebagai berikut :



1. Peranan adalah suatu usaha atau kemampuan dari orang-orang yang menduduki jabatan untuk dapat menggerakkan serta menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat dalam mencapai suatu tujuan.
2. Kelurahan dalam penelitian ini adalah Kelurahan Pangkalan Bunut yang merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.
3. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota.
4. Memelihara adalah menjaga atau merawat sesuatu yang telah ada agar tepat menjadi baik dan terpelihara
5. Ketenteraman dan ketertiban adalah situasi dan kondisi yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, rasa dilindungi, rasa ketenteraman lahir batin dan kepastian bebas dari kekawatiran dan ketakutan dengan menerapkan berbagai aturan yang disepakati.
6. Peranan Lurah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam penelitian ini dapat dilihat dari indikator yang ditetapkan berikut ini:
  - a. Mengusut dan menyelidiki dalam penelitian ini adalah cara yang ditempuh Lurah dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban di wilayahnya dengan melakukan pengusutan dan menyelidiki setiap permasalahan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum
  - b. Menangani dan melaporkan dalam penelitian ini hasil pengusutan dan menyelidiki yang telah dilakukan Lurah ditindak lanjuti dengan

melakukan penanganan masalah untuk dicari solusinya dan melaporkan kepihak kepolisian untuk menindak masalah-masalah yang telah meresahkan masyarakat umum.

- c. Mengatur dan mengawasi dalam penelitian ini Lurah melakukan tugasnya dengan upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga wilayahnya dari masalah-masalah yang mengganggu kenyamanan bersama.

### E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Tentang Peranan Lurah dalam Memelihara ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Di Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
Peranan adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila orang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. ( Soekanto 2002:243)	Peranan Lurah dalam Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Mengusut dan menyelidiki	a. Menganalisis masalah ketenteraman dan ketertiban umum. b. Melakukan mengusutan dan penyelidikan sumber masalah ketenteraman dan ketertiban umum. c. Menetapkan sumber masalah yang ada.	Berperan Cukup berperan Kurang berperan
		Menangani dan melaporkan	a. Mengkoordinasikan masalah ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak keamanan b. Melaporkan sumber masalah pengganggu ketenteraman dan	Berperan Cukup berperan Kurang berperan

1	2	3	4	5
			ketertiban umum kepada kepolisian. c. Mencari solusi atau cara mengatasi masalah ketenteraman dan ketertiban	
		Mengatur dan mengawasi	a. Menetapkan pola penanganan meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum b. Mewajibkan kegiatan siskamling c. Melakukan pengawasan efektivitas kegiatan siskamling d. Mengevaluasi kegiatan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum	Berperan Cukup berperan Kurang berperan

Sumber : Data Olahan 2017

#### F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui peranan pemerintah Lurah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan ditetapkanlah bentuk pengukuran baik itu pada pengukuran variabel maupun indikator variabel dengan persentase.

Untuk pengukuran dalam bentuk variabel peranan Lurah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, ditetapkan ukuran sebagai berikut:

Berperan : Apabila persentase variabel (tabel rekapitulasi) berada pada kisaran  $\geq 67\%$

Cukup Berperan : Apabila persentase variabel (tabel rekapitulasi) berada pada kisaran 34 % - 66 %

Kurang Berperan : Apabila persentase variabel (tabel rekapitulasi) berada pada kisaran  $\leq 33\%$ .

Untuk pengukuran indikator peranan Lurah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, sebagai berikut.

1. Mengusut dan menyelidiki,

Berperan : Apabila persentase jawaban responden berada pada kisaran  $\geq 67\%$

Cukup Berperan : Apabila persentase jawaban responden berada pada kisaran 34 % - 66 %

Kurang Berperan : Apabila persentase jawaban responden berada pada kisaran  $\leq 33\%$ .

2. Menangani dan melaporkan

Berperan : Apabila persentase jawaban responden berada pada kisaran  $\geq 67\%$

Cukup Berperan : Apabila persentase jawaban responden berada pada kisaran 34 % - 66 %

Kurang Berperan : Apabila persentase jawaban responden berada pada kisaran  $\leq 33\%$ .

### 3. Mengatur dan mengawasi

Berperan : Apabila persentase jawaban responden berada pada kisaran  $\geq 67\%$

Cukup Berperan : Apabila persentase jawaban responden berada pada kisaran 34 % - 66 %

Kurang Berperan : Apabila persentase jawaban responden berada pada kisaran  $\leq 33\%$ .

